



IMPLEMENTASI DIPLOMASI SIBER: VARIABEL KEBERHASILAN DIPLOMASI DALAM LINGKUP BILATERAL, REGIONAL, DAN GLOBAL

Jana Milia, Salsabilah Attamimi

Universitas Pertahanan Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2024

Revised April 2024

Accepted Mei 2024

Available online Mei 2024

Janamilia@idu.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan implementasi dari diplomasi siber dengan menganalisis variable keberhasilan diplomasi dalam lingkup bilateral, regional, dan global. Dalam konteks ilmu pengetahuan, isu siber merupakan isu yang baru terlebih dalam teoritis ilmu maupun praktisi, dikarenakan kepentingan manusia saat ini yang semakin kompleks, isu siber juga menjadi salah satu ancaman yang dapat mengakibatkan efek secara masif. Maka dari itu, untuk penanganan ancaman siber yang pada kenyataannya masih belum terdapat framework yang jelas diantara negara-negara untuk menghadapi ancaman siber, sehingga dibutuhkan protokol komunikasi atau dengan kata lain implementasi diplomasi siber ini sendiri dapat berjalan seiring dengan keberhasilan dari diplomasi antar negara-negara baik secara bilateral, regional, maupun global. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana variabel keberhasilan diplomasi dalam lingkup bilateral, regional dan global sehingga kesepakatan implementasi diplomasi siber ini dapat terlaksana. Penelitian ini menggunakan perspektif liberalisme, liberalisme institusional, dan konsep diplomasi itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif analitis. Data yang digunakan juga diperoleh dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 7 point penting dalam variable keberhasilan diplomasi dalam rangka implementasi diplomasi siber Indonesia, yaitu diantaranya: Confidence Building Measures, Early Warning System, Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di ASEAN, Capacity Building, Multi-stakeholders Approach, dan Hukum Siber Internasional.

Kata Kunci: *Diplomasi, Diplomasi Siber, Protokol komunikasi, Variabel Keberhasilan Diplomasi*

Abstract

This study aims to elucidate the implementation of cyber diplomacy by analyzing the factors for successful diplomacy at the bilateral, regional, and global levels. In the context of scientific discourse, cyber-related issues represent a relatively new field, both in theory and practice. As the needs of humanity grow increasingly complex, cyber threats have emerged as a significant



concern with potentially widespread impacts. Consequently, the lack of a clear framework among countries to address cyber threats has highlighted the need for communication protocols, or in other words, the implementation of cyber diplomacy that aligns with the success of diplomacy at various levels—bilateral, regional, and global. This study discusses how the factors for successful diplomacy at these levels contribute to the establishment of effective cyber diplomacy. The study employs perspectives from liberalism, institutional liberalism, and the concept of diplomacy itself. The research methodology used is descriptive-analytical, with data sourced from a variety of literature. The findings from this research indicate that there are 7 key elements in the success factors for implementing Indonesia's cyber diplomacy, which include Confidence Building Measures, Early Warning Systems, Computer Security Incident Response Teams (CSIRT) within ASEAN, Capacity Building, Multi-stakeholder Approaches, and International Cyber Law.

Keywords: *Diplomacy, Cyber Diplomacy, Communication Protocol, Variable of Successful Diplomacy*

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan globalisasi saat ini, secara tidak langsung juga membawa perkembangan bagi kemajuan teknologi dan informasi, transformasi dunia yang serba digital, hingga kemunculan ruang siber sebagai dunia baru bagi pemanfaatan teknologi saat ini. Hampir disemua sektor bertransformasi menggunakan ruang siber sebagai *bank* data baik dari Pemerintahan, edukasi, industri, individual, organisasi, bahkan pertahanan yang telah terdigitalisasi dan terkoneksi dengan ruang siber secara langsung.

Isu siber memang terbilang baru bagi kehidupan umat manusia, dimana hal ini juga menyangkut pergeseran makna peperangan antar negara itu sendiri. Isu yang kontemporer ini memiliki potensi ancaman yang signifikan dengan resiko ancaman yang besar dan efek yang cukup luas dan menyangkut berbagai sektor kehidupan.¹ Dewasa ini, para ilmuwan telah mengklasifikasikan ancaman siber menjadi 3 bagian seperti yang dijelaskan Andi Widjayanto ialah penyerang (*attackers*), metode menyerang (*attack methods*) serta target penyerangan (*targeted capabilities*).² Penyerang bisa saja individu, pemerintahan, *organized crime*, bahkan teroris. Metode penyerangan dengan berbagai macam seperti virus, *web attacks*, *database attacks*, dan lain lainnya. Untuk target penyerangan ialah *Critical infrastructur*, *IT infrastructure*, *corporate*, dan personal.³

Maka dari itu, untuk penanganan ancaman siber yang pada kenyataannya masih belum terdapat *framework* yang jelas diantara negara-negara untuk menghadapi ancaman siber sehingga menurut penelitian Salsabilah dibutuhkan sebuah protokol

¹ Report World Economic Forum, *The Global Risks Report 2017 12th Edition*, Geneva

² Widjayanto, Andi. 2017. *Cyber Diplomacy*. Bandung, Jawa Barat

³ *Ibid.*,



komunikasi diantara negara-negara dalam menangani potensi resiko insiden pada ruang siber baik dalam level regional maupun global, juga dapat meningkatkan mutual trust dalam ruang siber itu sendiri.⁴ Indonesia sebagai *middle power* diantara negara maju dan berkembang lainnya diharapkan perlu menjembatani kerjasama khususnya kerjasama diruang siber yang diunakan untuk menjamin kedaulatan informasi sebuah negara dan melindungi kepentingan nasionalnya. Protokol komunikasi akhirnya akan menjadi kerjasama antara negara-negara untuk sepakat dalam pertukaran informasi dan protokolnya untuk menyelesaikan permasalahan.

Lebih lanjut penelitian Salsabilah mengatakan bahwa:

“Dalam diplomasi siber yang menjadi sebuah kendala adalah komunikasi. Belum adanya kesepakatan dalam satu komunikasi di ruang siber kemudian membuat ancaman siber menjadi lebih potensial. Oleh karenanya, protokol komunikasi kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah ‘ways’ dalam menginisiasi diplomasi siber. Protokol komunikasi yang dimaksud adalah dengan membangun suatu operating system khusus yang sengaja dibuat sebagai sarana komunikasi ketika terindikasi adanya ancaman siber baik anomali atau bahkan insiden yang melibatkan lebih dari satu negara. Sehingga pada saat darurat pihak yang menemukan indikasi adanya ancaman siber dapat menginput kode-kode tertentu yang menginterpretasi keadaan yang dialami. Hal tersebut berfungsi sebagai sistem peringatan dini dalam mekanisme diplomasi siber.”

Dengan hadirnya protokol komunikasi sebagai bagian dari inisiasi Indonesia baik kepada regional maupun global akan menjadi *bargaining power* sebagai inisiator sekaligus meningkatkan citra secara global. Mengingat Indonesia bukan negara *super power* ataupun negara yang maju dalam teknologi dan siber. Hal ini akan sangat sulit untuk menginisiasikan kepada negara lain jika dilihat dari posisi Indonesia. Walaupun dalam tataran regional seperti ASEAN dan Asia Pasifik Indonesia memiliki posisi yang kuat sebagai negara yang pernah menginisiasikan terbentuknya ASEAN dan gerakan non-blok negara-negara Asia Afrika.

Tantangan Indonesia ialah bagaimana sebuah inisiasi yang ditujukan untuk kepentingan bersama ini dapat terwujud mengingat posisi Indonesia bukan negara yang besar bagi negara-negara lain di dunia. Untuk itu, berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Salsabilah yang menginisiasikan protokol komunikasi⁵ sebagai instrument diplomasi siber bagi negara-negara baik di tingkat regional maupun global, melanjutkan pandangan tersebut bahwa keberhasilan sebuah diplomasi dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu bilateral, regional, dan global yang untuk selanjutnya diimplementasikan dalam diplomasi siber yang menggunakan protokol komunikasi sebagai instrument diplomasi itu sendiri.

2. Teori dan Konsep Penelitian

⁴ Salsabilah, *Tinjauan Strategi Protokol Komunikasi sebagai Inisiasi Diplomasi Siber Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam Meningkatkan Cybersecurity*. 2017. *Asymmetric Warfare, Indonesia Defense University*

⁵ *Ibid.*,



Protokol Komunikasi dalam pandangan Liberalis Institusional

Dalam hubungan internasional, liberalisme menganggap adanya integrasi regional, institusi multilateral, dan kerjasama dalam sistem anarki merupakan hal yang penting. Hal itu terjadi, karena menurut kaum liberal, kerjasama dalam sistem anarki dan integrasi regional dapat mencegah terjadinya peperangan antarnegara, karena ketika satu negara melakukan integrasi dan kerjasama dengan negara lain, maka negara-negara tersebut akan saling mengetahui karakteristik masing-masing negara dan tidak akan terjadi peperangan diantara keduanya. Hal ini diasumsikan dengan sifat manusia yang apabila terdapat dua manusia yang saling mengetahui karakteristik satu sama lain, maka akan sangat kecil kemungkinan kedua manusia tersebut untuk berkelahi.⁶

Dalam perkembangannya, liberalisme sendiri terbagi menjadi tiga bentuk pemikiran, salah satu-nya yaitu liberalisme institusional dimana sebuah institusi akan memajukan kerjasama antar negara dan mengurangi ketakutan sama lain akan ancaman.⁷ Pemikiran-pemikiran liberal institusionalisme awalnya adalah pentingnya pruralisme aktor dalam hubungan internasional seperti MNCs, IGOs, dan NGOs, yang menganggap peran serta aktor non-negara dalam hubungan antarnegara adalah suatu hal yang penting, serta menekankan pentingnya adanya suatu bentuk interaksi baru antarnegara seperti integrasi dan kerjasama.

Dalam tulisan ini protokol komunikasi sebagai inisiasi Indonesia terhadap negara-negara baik ditingkat regional maupun global untuk menghadapi ancaman *cyber crime* dan *cyber security*. Protokol komunikasi dapat dikatakan sebagai alat (institusi) yang dapat menyatukan negara-negara dalam sebuah kerjasama. Dalam menghadapi ancaman tentunya negara-negara tidak dapat bergerak sendiri. Terlebih ancaman tersebut bersifat global. Seperti halnya asumsi liberalis institusionalisme bahwa Integrasi dan kerjasama transnasional merupakan hal yang diperlukan karena setiap negara memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga dalam menghindari keterbatasan tersebut suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Untuk itu, atas dasar ini protokol komunikasi merupakan suatu *framework* yang sah untuk dibuat dalam sebuah kerjasama dan integrasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerjasama itu sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan mengurangi ancaman. Terlebih protokol komunikasi sebagai langkah yang merupakan inisiasi dari Indonesia.

3. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi di mana peneliti berusaha memahami fenomena sosial secara bertahap dengan memasuki dunia

⁶ Wardhani, Baiq, (2014). *Liberalisme dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press

⁷ R. Jackson & G. Sorensen, (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



informan dan melakukan interaksi terus-menerus dan mencari sudut pandang informan tersebut.

Penelitian ini dikumpulkan dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Tujuan utama penelitian deskriptif ialah untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai responden dan mendiskusikan isu-isu yang muncul dalam topik penelitian tersebut.⁸ Jadi, data yang telah terkumpul akan dikategorikan dengan sedemikian rupa, diinterpretasikan dan dianalisis menggunakan teori untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Terakhir, hasil jawaban tersebut ditarik ke dalam sebuah kesimpulan.

Adapun Langkah-langkah pengumpulan data kualitatif meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi.⁹ Data dalam penelitian menggunakan pengumpulan data sekunder. Dimana Untuk data primer, peneliti melakukan wawancara. Sedangkan untuk sekunder melalui studi pustaka. Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka melalui buku, internet, seminar, jurnal ilmiah, artikel dan tulisan lainnya.

4. Hasil dan Pembahasan

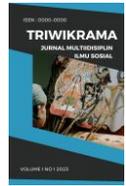
4.1 Variabel Keberhasilan Diplomasi

Diplomasi secara umum dapat diartikan sebagai alat atau instrument yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Diplomasi dapat dikatakan sebagai “benteng” utama dalam meraih dan mempertahankan kepentingan nasional sebuah negara. Diplomasi juga dipercaya sebagai langkah awal untuk mencegah perang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pentingnya kedudukan diplomasi dalam politik internasional ini menjadi sangat jelas yaitu menghindari terjadinya kontak fisik yang disebut perang seperti halnya PD I, II, dan lainnya menjadi sejarah interaksi dan hubungan antar bangsa hingga saat ini.

Perkembangan hubungan internasional hingga saat ini menempatkan interaksi antar negara-bangsa dapat diklarifikasikan antara *state actor* dan *non-state actor* yang pada akhirnya akan membawa pada kerjasama secara bilateral & multilateral (Regional dan global). Negara-negara yang melakukan diplomasi untuk mencapai tujuan politiknya pada akhirnya akan melakukan berbagai perundingan atau negosiasi serta penerapan kepandaian dan taktik dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, *state* dan *non-state actor* tersebut akan menggunakan berbagai cara yang taktis dalam melakukan perundingan dan negosiasi dengan negara lain. Disamping, diplomasi

⁸ Bandur, Agustinus. (2016). Penelitian Kualitatif: Metofologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.

⁹ Crewell, John W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Empat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



juga dapat diartikan sebagai politik luar negeri yang merupakan skop yang lebih besar dari sebatas perundingan.

Berdasarkan sejarah dan *issues* yang telah terjadi berkaitan dengan diplomasi khususnya di negara Indonesia. Peneliti merumuskan variabel keberhasilan diplomasi dalam kerjasama bilateral, regional, dan global. Sangat penting membagi interaksi negara serta bentuk praktek diplomasi yang dilakukan ke dalam 3 matra ini, dikarenakan dalam melakukan interaksi akan memiliki pola yang berbeda juga serta presentase keberhasilan terhadap pola yang sama juga akan berbeda. Akan tetapi, walaupun pasti akan terdapat perbedaan dan perdebatan, tentunya ada suatu nilai yang dinamakan “standart universal” yang akan menjadi tolak ukur secara tidak langsung, sebagai berikut:

4.1.1 Diplomasi Bilateral

- Pola Interaksi (Pertemanan atau permusuhan) yang ditinjau dari Histori kedua negara

Pola pertemanan dan permusuhan yang ditarik dari sejarah kebelakang antar negara itu penting untuk diketahui karena hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara selanjutnya. Hal tersebut akan menjadi suatu tinjauan logis bagaimana keberhasilan diplomasi antar dua negara tersebut.

- Menciptakan *Confidence Building Measures* yang kuat

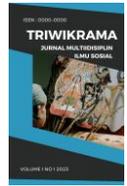
Meminjam dari istilah diplomasi pertahanan, membangun rasa saling percaya antar negara yang akan melancarkan kepentingan dalam menjalankan praktik diplomasi. Membangun kepercayaan sebuah negara dapat dilakukan seperti misalnya melakukan kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara, pemberian bantuan, pemberian beasiswa, memberikan bantuan (materil dan non materil) kepada negara kecil anggota PBB dan sebagainya yang bertujuan untuk menguatkan kepercayaan yang tidak hanya dibangun melalui kerjasama pertahanan.

- Mengadakan Pertemuan, Kunjungan Kenegaraan dan Dialog antar *Stakeholder* baik untuk membahas *outstanding issues* maupun *mutual interest*

Bagi beberapa negara yang memiliki kedekatan yang sangat baik seperti Indonesia dan Singapura membangun hubungan yang baik dengan membuat *leader retreat* yang merupakan pertemuan tahunan secara resmi antar kepala negara yang membahas *outstanding issues* kedua negara dan *mutual interest*.

- Membagi Keuntungan minimal 50:50 atau tidak lebih dari 50

Dalam praktik diplomasi yang didasarkan pada kepentingan nasional untuk sangat memperhatikan keuntungan dalam setiap kesepakatan yang terjadi. Minimal keuntungan yang dapat di toleransi ialah 50:50 atau tidak lebih dari 50 dari total keuntungan pihak lainnya. Dengan menggunakan patokan, diplomat akan lebih berhati-hati dalam menarik kesepakatan terutama menyangkut kepentingan nasional jangka panjang.



- Kesamaan Ideologi

Pada dasarnya negara-negara akan lebih mudah bekerjasama satu sama lain atas dasar kesamaan ideologi. Negara yang memiliki kesamaan ideologi cenderung akan lebih terbuka dengan ideologi yang sama dibanding negara yang berbeda tidak memiliki kepercayaan yang kuat sebagai pondasi dalam bekerjasama.

- Kemampuan Komunikasi Diplomat

Nyatanya, dari semua variabel, pentingnya memiliki diplomat yang cakap dalam melakukan komunikasi dan negosiasi terkait kepentingan nasional ini lebih diutamakan. Selain komunikasi, hal yang perlu ditekankan dari seorang diplomat ialah penguasaan sejarah sehingga ketika kita dapat meyakinkan orang lain melalui penguasaan sejarah yang kita ketahui, hal tersebut akan lebih membantu.

4.1.2 Diplomasi Regional

- Membuat Ancaman Bersama dalam keadaan *urgent issue*

Tidak mudah untuk meyakinkan negara-negara lain khususnya dalam lingkup regional seperti ASEAN untuk menyepakati sebuah *urgent issue* atau *new threats*. Akan tetapi, hal ini lah yang kemudian akan menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana membuat suatu *framework* yang didasarkan pada ancaman bersama dengan memperhitungkan besar kerugian dari ancaman tersebut.

- Mengadakan forum dan pertemuan dengan negara di kawasan

Lebih banyak forum dan pertemuan maka akan semakin *intens* sebuah *outstanding issue* akan dibahas sehingga kemungkinan besar untuk mendoktrin isu-isu yang ingin direalisasikan penyelesaiannya.

- Menciptakan seorang *leader* yang di segani (contoh. Soekarno & Soeharto dalam menciptakan gerakan non-block)

Belajar dari apa yang telah dilakukan para pemimpin Indonesia pada masa lampau yang berhasil menyatukan negara-negara Asia Pasifik untuk membuat gerakan non-blok yang hingga hari ini berhasil dilakukan. Untuk itu, dalam tataran regional dan global perlu menunjukkan sosok pemimpin seperti demikian.

4.1.3 Diplomasi Global

- Menarik dukungan dari berbagai negara melalui diplomasi bilateral dan regional sebelumnya

Dalam menarik dukungan dalam diplomasi global, yang perlu digarisbawahi ialah kita harus mengetahui dan memetakan negara-negara yang pro dan kontra terhadap inisiasi yang akan diajukan. Melakukan diplomasi bilateral dan regional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan untuk menekankan kepada negara-negara tujuan dari inisiasi tersebut. Dukungan-dukungan tersebut lah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan negara Indonesia sebagai inisiator di meja internasional.



- Menarik simpati melalui *speech* dari sisi linguistik

Walaupun terkesan sepele, akan tetapi kekuatan suatu kata-kata merupakan sebuah senjata yang ampuh untuk menarik orang lain kepada kepentingan kita. Dari sisi ilmu linguistik, *speech* merupakan suatu hal yang dapat diperdalam. Disamping itu, jika dalam sebuah *speech* yang mengandung rangkaian kata-kata persuasif lebih dalam juga akan menjadi suatu kekuatan terhadap negara-negara lain.

- Memanfaatkan pertemuan-pertemuan tingkat *Summit*

Summit merupakan pertemuan setiap tahun oleh negara-negara didunia yang dalam hal ini diwakili langsung oleh kepala negara masing-masing negara. Disinilah kesempatan untuk membuat inisiasi baru yang ditawarkan langsung kepada kepala negara atau kepala pemerintahan yang berkaitan sehingga, inisiasi yang diajukan dapat segera ditindak.

- Memanfaatkan Peran Media (Diplomasi publik)

saat ini suara terkuat ialah suara rakyat, bagi negara demokrasi, suara rakyat adalah hal yang paling utama. Untuk itu, dengan memanfaatkan media yang akan mengarah pada diplomasi publik maka inisiasi yang ada akan dipertimbangkan untuk urgensi kepentingan warga negara.

4.2 Implementasi Diplomasi Siber Indonesia

1. *Confidence Building Measures*

Indonesia perlu mengajak negara-negara untuk menggunakan ruang siber dengan tujuan damai. Melalui CBMs, Indonesia juga dapat mengusulkan pembentukan:

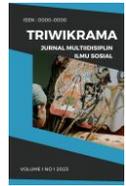
- *early warning system*.
- *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)* di ASEAN

2. *Capacity Building*

Diplomasi siber Indonesia perlu difokuskan untuk membantu pengembangan kapasita siber negara-negara dengan menetapkan area kerjasama prioritas, bersifat *multi-direction* serta penguatan peran Indonesia sebagai negara donor dalam pembangunan kapasitas negara-negara lain mengenai isu siber.

3. *Multi-stakeholders Approach*

Diplomasi siber Indonesia agar diupayakannya *engagement* yang lebih intens dengan *non-state actors*. Pendekatan Multi-stakeholders dalam implementasi diplomasi siber adalah strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan ahli teknologi, untuk bekerja sama dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan keamanan siber dan diplomasi siber. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa keamanan siber adalah isu kompleks yang mempengaruhi berbagai sektor dan membutuhkan kolaborasi lintas sektoral dan lintas negara. Dalam konteks diplomasi siber, multi-stakeholders approach dapat digunakan untuk:



- **Pertukaran Informasi dan Kolaborasi:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan berkolaborasi dalam mengatasi ancaman siber. Ini mencakup pertukaran intelijen siber, pengetahuan teknis, dan praktik terbaik.
- **Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas:** Melalui kerjasama multi-pemangku kepentingan, pendidikan, dan pelatihan dapat disediakan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi ancaman siber.
- **Pengembangan Kebijakan dan Regulasi:** Dengan melibatkan berbagai pihak, regulasi dan kebijakan yang komprehensif dapat dirancang untuk mengatasi isu-isu siber dengan lebih efektif, sambil mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok.
- **Penyelesaian Konflik dan Diplomasi:** Dalam hal terjadi insiden siber antar negara, pendekatan multi-pemangku kepentingan dapat membantu dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi.
- **Inovasi dan Teknologi Baru:** Melibatkan industri teknologi dan inovasi dalam diskusi multi-stakeholders memungkinkan identifikasi solusi baru dan teknologi inovatif untuk mengatasi masalah keamanan siber.

4. Hukum Siber Internasional

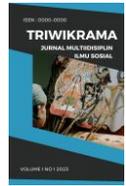
Pengaplikasian hukum internasional yang tersedia saat ini untuk kejahatan siber dan perang siber. Seperti dalam hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai prosedur perlindungan dan penghukuman aksi-aksi perang, yang bisa diterapkan pula dalam isu siber. Serta Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menjadi pihak dalam *Budapest Convention*.

5. *Cyber Etics*

selain menawarkan *free* dan *open* dalam penggunaan internet, Indonesia juga perlu mengusung *responsible* sebagai tema utama dalam diplomasi siber. Cyber ethics adalah konsep yang berkaitan dengan prinsip, pedoman, dan standar moral yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terutama di lingkungan digital atau dunia siber. Ini mencakup berbagai aspek, seperti privasi, keamanan siber, hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, dan perilaku online yang etis. Cyber ethics membantu individu dan organisasi memahami bagaimana berinteraksi dengan teknologi dan orang lain di internet dengan cara yang bertanggung jawab dan menghormati hak serta martabat semua pengguna.

6. ICT untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Semua teknologi yang digunakan untuk menangani informasi dan komunikasi, termasuk sistem komputasi, telekomunikasi, jaringan, perangkat lunak, perangkat keras, internet, serta layanan dan infrastruktur terkait dapat ditingkatkan dalam pembangunan berkelanjutan.



7. *Start-up Diplomacy*

Indonesia perlu mendukung promosi *grassroots enterprenuership* yang khusus berbasis strat-up digital ke pasar dunia melalui forum-forum bisnis internasional serta *joint venture*. konsep yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong dan membantu pertumbuhan perusahaan startup internasional melalui jalur diplomasi dan hubungan bisnis internasional. Dalam situasi seperti ini, Indonesia dapat berperan aktif dalam mendorong pengembangan bisnis rintisan digital yang bertujuan untuk masuk ke pasar internasional.

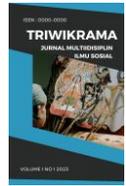
- Promosi Global Start-up Indonesia: Dengan mendukung promosi usaha rintisan berbasis digital ke dunia internasional, Indonesia dapat memperkenalkan inovasi dan bakat lokal kepada investor dan mitra bisnis global.
- Penguatan Ekosistem Start-up: Dukungan pada promosi start-up di pasar global juga membantu menguatkan ekosistem start-up di dalam negeri.
- Joint Venture dan Kolaborasi Internasional: Melalui joint venture dan kolaborasi dengan perusahaan internasional, start-up Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Ini memungkinkan transfer teknologi dan inovasi, serta membantu start-up Indonesia untuk lebih bersaing di pasar global.
- Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi
- Membangun Reputasi Indonesia di Dunia Start-up: Dengan mendorong start-up lokal untuk berkembang secara internasional, Indonesia dapat membangun reputasi sebagai sumber inovasi dan teknologi.

Dengan demikian, Start-up Diplomacy adalah strategi yang dapat membantu Indonesia menjadi pemain penting dalam lanskap digital global dengan cara mendukung dan mendorong ekspansi start-up lokal ke pasar dunia melalui berbagai forum bisnis dan kemitraan internasional.

5. **Simpulan**

Implementasi diplomasi siber melalui inisiasi Indonesia ini akan menjadi kunci keberhasilan diplomasi siber diantara negara-negara saat ini yang pada dasarnya belum memiliki *framework* yang kuat dalam membangun kerjasama dibidang siber. Walaupun banyak kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikannya, sumbangan pemikiran mengenai keberhasilan diplomasi secara umum diatas bisa menjadi rujukan bagi Indonesia dalam melakukan diplomasi baik *first track*, *two track*, maupun *multitrack* diplomasi.

Variabel Keberhasilan diplomasi secara umum diatas ditujukan untuk menjawab tantangan bagaimana diplomasi dapat berhasil atau inisiasi Indonesia



dibidang siber dapat diterima yang berdasarkan sejarah dan pengalaman diplomasi Indonesia saat ini.

Adapun hal yang dilakukan paling utama dalam menjalankan diplomasi siber di tingkat regional ialah terlebih dahulu kita harus mengklasifikasikan negara-negara yang pro dan memiliki *high risk* atas ancaman siber sehingga untuk proses diplomasi bilateral yang menyangkut diplomasi siber ini akan jauh lebih mudah. Selanjutnya, setelah mengetahui berbagai negara yang pro dan kontra terhadap kerjasama siber, tentunya kita akan mensimulasikan ini ke regional ASEAN sebagai organisasi terdekat Indonesia. Terdapat tiga variabel yang bertujuan untuk membuat negara lain menyetujui hal tersebut sehingga pada akhirnya setelah protokol komunikasi dapat disetujui dan diimplementasikan ditingkat regional, maka hal ini akan menjadi *role model* bagi Indonesia untuk diimplementasikan dalam tingkat global yang tentunya dalam kerangka kerjasama dan diplomasi siber antar negara-negara di dunia.

Untuk menjawab implementasi diplomasi siber di Indonesia itu sendiri dapat dibagi menjadi 7 bagian yaitu: confidence building measures melalui early warning system, dan CSIRT di Asean, lalu Capacity building, Multi-stakeholder approach, penguatan hukum siber internasional, menciptakan cyber ethics, ICT untuk tujuan pembangunan dan berkelanjutan, serta start up *diplomacy*.

Daftar Referensi

Buku:

- Bandur, Agustinus. (2016). Penelitian Kualitatif: Metofologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Cresswell, John W. (2016). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Empat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Jackson & G. Sorensen, (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Report World Economic Forum, *The Global Risks Report 2017 12th Edition*, Geneva
- Wardhani, Baiq, (2014). *Liberalisme dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press
- Widjayanto, Andi. 2017. *Cyber Diplomacy*. Bandung, Jawa Barat

Thesis Penelitian:

- Salsabilah, *Tinjauan Strategi Protokol Komunikasi sebagai Inisiasi Diplomasi Siber Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam Meningkatkan Cybersecurity*". 2017. Asymetric Warfare, Indonesia Defense University